

# SKRIPSI

## **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PARTISIPASI PENGANGGARAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



Oleh:

**RANTI NOVERA  
185310062**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

# SKRIPSI

## **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PARTISIPASI PENGANGGARAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana  
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

**RANTI NOVERA**

**185310062**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Ranti Novera  
NPM : 185310062  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi  
Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap  
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan  
Meranti

Disahkan Oleh:  
**PEMBIMBING**

  
Dr. H. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA

**Mengetahui:**

**DEKAN**

**KETUA PRODI**

  
Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

  
Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

**TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Nama : Ranti Novera  
NPM : 185310062  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul Penelitian : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti

**Disetujui Oleh**

**Tim Penguji**

1. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
2. Muhammad Fahdi, SE., M.Ak

**Tanda Tangan**

(  )  
(  )

**Pembimbing**

  
**Dr. Drs. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA**

**Mengetahui**

Ketua Program Studi Akuntansi S1

  
**Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution, No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GANJIL TA 2021/2022**

NPM : 185310062  
 Nama Mahasiswa : RANTINOVERA  
 Dosen Pembimbing : 1. Drs ABRAR M.Si., Ak., CA  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : The Influence of Human Resource Competence, Budgeting Participation and Utilization of Information Technology on Village Fund Management Accountability in Meranti Islands Regency  
 Lembar Ke : 1 (Satu)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	28 November 2021	Latar belakang permasalahan Metode penelitian diperbaiki Kuesioner dilengkapi dan pertanyaan diperbaiki Lengkapi dengan tanda tangan dan stempel desa	Sudah diperbaiki	
2	27 Desember 2021	Fenomena permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa	Sudah diperbaiki	
3	04 Januari 2022	Menentukan responden yang dijadikan sampel Kuesioner yang digunakan buat sendiri atau menggunakan kuesioner yang dibuat penelitian lain?	Sudah diperbaiki	
4	17 Januari 2022	Kepala desa mana? Tambahkan akuntabilitas dana desa, pemanfaatan teknologi informasi definisi dan indikatornya Jelaskan responden yang dijadikan sebagai sampel	Sudah diperbaiki	
5	24 Januari 2022	Proposal disetujui untuk diseminarkan	Sudah diperbaiki	
6	02 Juni 2022	Perbaiki abstrak Hipotesis mana yang ditolak? Jelaskan pengaruh positif atau negatif, dana apa maknanya Perbaiki kesimpulan	Sudah diperbaiki	
7	20 Juni 2022	Apakah merumuskan Ho. Dimana dan apa bunyi nya?	Sudah diperbaiki	
8	24 Juni 2022	Dalam pengujian hipotesis harus dirumuskan dahulu Ho dan H1 untuk setiap variabel. Baru dilakukan uji hipotesis. Ada perbedaan antara hipotesis penelitian dengan hipotesis statistik	Sudah diperbaiki	
9	07 Juli 2022	Cara pengujian hipotesis parsial harus lakukan satu persatu	Sudah diperbaiki	
10	19 Juli 2022	Skripsi disetujui untuk diseminarkan	Sudah diperbaiki	

Pekanbaru, .....  
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTG1MZEWMDYY

(Dr. Hj. Siska, SE., M.Si. Ak., CA)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647**

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 843/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 08 Agustus 2022, Maka pada Hari Selasa 09 Agustus 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2022/2023

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama                 | : Ranti Novera   |
| 2. NPM                  | : 185310062  |
| 3. Program Studi        | : Akuntansi S1   |
| 4. Judul skripsi        | : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. |
| 5. Tanggal ujian        | : 09 Agustus 2022  |
| 6. Waktu ujian          | : 60 menit.  |
| 7. Tempat ujian         | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR  |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : <b>Lulus (B+) 79,9</b>   |
| 9. Keterangan lain      | : Aman dan lancar.   |

PANITIA UJIAN

Ketua

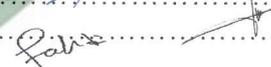
  
**Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA**  
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris

  
**Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**  
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr. H. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA
2. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
3. Muhammad Fahdi, SE., M.Ak

  
.....  
  
.....  
  
.....

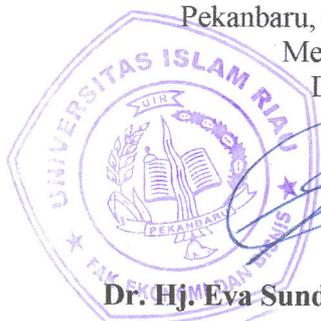
Notulen

1. Yolanda Pratami, SE., M.Ak

  
.....

Pekanbaru, 09 Agustus 2022

Mengetahui  
Dekan,



  
**Dr. Hj. Eva Sundari, SE., MM., CRBC**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 843 / Kpts/FE-UIR/2022  
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.  
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.  
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.  
7. Surat Keputusan BAN-PT Depdiknas RI :  
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun  
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen  
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1  
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

**MEMUTUSKAN**

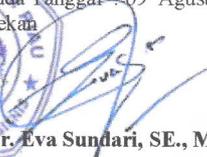
- Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Ranti Novera  
N P M : 185310062  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul skripsi : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	S Jabatan
1	Dr. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Dina Hidayat, SE., M.Si, Ak	Assisten Ahli, III/a	Sistematika	Sekretaris
3	Muhammad Fahdi, SE.,M.Ak	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Lektor III/C	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.  
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 09 Agustus 2022  
Dekan  
  
**Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC**

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

**BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI**

Nama : Ranti Novera  
NPM : 185310062  
Jurusan : Akuntansi / S1  
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.  
Hari/Tanggal : Selasa 09 Agustus 2022  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Muhammad Fahdi, SE., M.Ak		

Hasil Seminar : \*)

1. Lulus ( Total Nilai )
2. Lulus dengan perbaikan ( Total Nilai **80,5** )
3. Tidak Lulus ( Total Nilai )

Mengetahui  
An.Dekan

  
Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA  
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 09 Agustus 2022  
Ketua Prodi

  
Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

\*) Coret yang tidak perlu

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647**

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Ranti Novera  
NPM : 185310062  
Judul Proposal : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.  
Pembimbing : 1. Dr. H. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA  
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 09 Februari 2022

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan \*)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali \*)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki \*)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki \*)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas \*)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang \*)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas \*)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas \*)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas \*)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian \*)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat \*)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali \*)

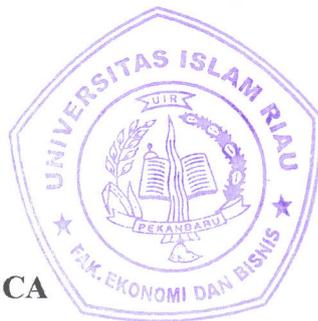
Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	2. 
3.	Haugesti Diana, SE., M.Ak	Anggota	3. 

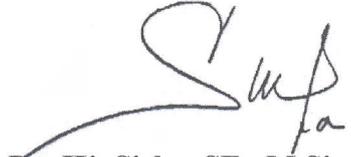
\*Coret yang tidak perlu

Mengetahui  
An.Dekan Bidang Akademis

  
Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 09 Februari 2022  
Sekretaris,

  
Br. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor: 1199/Kpts/FE-UIR/2021**  
**TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-19 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018  
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021  
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.  
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UJR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau  
 a. Nomor: 510/A-UJR/4-1987

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dr. Drs. Abrar, M.Si., Ak., CA.	Lektor kepala	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
- N a m a : Ranti Novera  
 N P M : 185310062  
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1  
 Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UJR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru  
 Pau. Tanggal: 21 Oktober 2021  
 Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau  
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : RANTI NOVERA  
NPM : 185310062  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,  
PARTISIPASI PENGANGGARAN DAN PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN  
MERANTI

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 19 % pada  
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,  
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas  
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Agustus 2022

Setia Program Studi Akuntansi



Siska SE., M.Si., Ak., CA

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:  
**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PARTISIPASI  
PENGANGGARAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022

Yang memberi pernyataan,



*Ranti Novera*  
Ranti Novera

NPM: 185310062

## ABSTRACT

*This research was conducted in Meranti Islands Regency with the object of its research, namely the Village located in Meranti Islands Regency. This research aims to determine the influence of Human Resource Competencies, Budgeting Participation and Utilization of Information Technology on Village Fund Management Accountability in Meranti Islands Regency.*

*This research is a type of quantitative research. The population in this study was 96 villages and the total sample was 32 villages with 128 respondents. Respondents consisted of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer and Government Kasi. The research data was collected through questionnaires and the sampling technique used was a purposive sampling technique. The data analysis used is Multiple Linear Regression Analysis using the help of the SPSS 25 program.*

*The results of the study data concluded that Human Resource Competence has a positive and significant effect on Village Fund Management Accountability, Budgeting Participation has a positive and significant effect on Village Fund Management Accountability and Information Technology Utilization has a positive and significant effect on Village Fund Management Accountability. It is known that the adjusted R Square value is 0.556. This value is interpreted to mean that the magnitude of the influence of Human Resource Competence, Budgeting Participation and Utilization of Information Technology on the Accountability of Village Fund Management in the Meranti Islands Regency is 55.6% while the remaining 44.4% is influenced by other variables that were not studied in this study.*

**Keywords:** *Competence of Human Resources, Budgeting Participation, Utilization of Information Technology, Accountability of Village fund Management*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur yang dalam atas Kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-NYA, serta Shalawat beriring sallah atas junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti”**. Untuk memenuhi persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin dan ketetapan Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari orang-orang di sekitar penulis yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Drs. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran, dan bersedia membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang penulis terima dapat berguna di kemudian hari dan selalu diberkahi Allah SWT, sehingga dapat berguna di kemudian hari. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, staf perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Suyanto dan Ibu Zubaidah, serta adek tersayang Apyogi Nafizan atas segala curahan kasih sayang, dukungan, perhatian, dan pengarahan serta do'a yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh percaya diri.
7. Kepada Abang Bima Adio A.Md.Kom yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan dukungan dan bantuan dalam melakukan proses penelitian dan menyelesaikan kesulitan yang dihadapi penulis.
8. Kepada yang tersayang Ahmad Yusuf yang telah menjadi *support system* dan *mood booster* bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Sahabat Yeni Idayanti, Afriliya Fratiwi, Fanny Putri Cahyaningrum, Wanda Trisela dan Evi Ardianti yang sama-sama berjuang mengejar sarjana

serta yang sudah memberikan dukungan serta semangat sehingga penulis dapat melalui banyak suka dan duka dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Selanjutnya apabila terdapat kesalahan baik materi yang tersaji maupun dalam teknik penulisannya, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

Penulis

Ranti Novera

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI .....	vii
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	viii
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL .....	ix
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI .	x
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>15</b>
2.1 Telaah Pustaka .....	15
2.1.1 Teori Agensi ( <i>Agency Theory</i> ).....	15
2.1.2 Dana Desa .....	16
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa .....	18

2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	21
2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	25
2.1.6 Partisipasi Penganggaran.....	27
2.1.7 Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	28
2.2 Penelitian Terdahulu .....	32
2.3 Kerangka Pemikiran .....	34
2.4 Hipotesis .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Desain Penelitian.....	40
3.2 Objek Penelitian.....	40
3.3 Definisi Variabel Penelitian.....	40
3.3.1 Variabel Bebas (Independen).....	40
3.3.2 Variabel Terikat (Dependen).....	41
3.4 Populasi dan Sampel.....	43
3.4.1 Populasi .....	43
3.4.2 Sampel.....	43
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.7 Metode Analisis Data .....	46
3.7.1 Statistik Deskriptif.....	46
3.7.2 Uji Kualitas Data .....	47
3.7.3 Uji Asumsi Klasik .....	48
3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda .....	50
3.7.5 Pengujian Hipotesis.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	53
4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti .....	53
4.1.2 Kependudukan.....	54
4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	55
4.2 Hasil Penelitian.....	55
4.2.1 Deskripsi Data .....	55
4.2.2 Karakteristik Responden .....	56

4.2.3 Statistik Deskriptif.....	59
4.2.4 Uji Kualitas Data.....	61
4.2.5 Uji Asumsi Klasik.....	65
4.2.6 Analisis Regresi Linier Berganda.....	70
4.2.7 Pengujian Hipotesis.....	72
4.3 Pembahasan.....	77
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>83</b>
5.1 Simpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa .....	3
Tabel 1.2 Rincian Dana Desa Kabupaten Kepulauan Meranti 2020 .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 3.1 Devinisi Variabel Penelitian .....	42
Tabel 3.2 Daftar Sampel dan Responden Desa Kabupaten Kepulauan Meranti...	44
Tabel 3.3 Skala Likert .....	46
Tabel 4.1 Daftar Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti .....	54
Tabel 4.2 Jumlah Kembalinya Data Kuesioner.....	56
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	57
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	57
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	58
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Masa Kerja .....	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	61
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Penganggaran.....	62
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ..	63
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	64
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Partisipasi Penganggaran.....	64
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	64
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	64
Tabel 4.16 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov .....	66
Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinearitas.....	67
Tabel 4.18 Hasil Uji Glejser .....	69
Tabel 4.19 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	70
Tabel 4.20 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	73
Tabel 4.21 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F).....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian .....	38
Gambar 4.1 Hasil Uji Scatterplot .....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Bukti Pengambilan Data
- Lampiran 4 : Dokumentasi Pengisian Kuesioner
- Lampiran 5 : Data Hasil Penelitian
- Lampiran 6 : Data Variabel Independen dan Dependen
- Lampiran 7: Uji Statistik Deskriptif
- Lampiran 8 : Uji Validitas
- Lampiran 9 : Uji Reliabilitas
- Lampiran 10 : Nilai r Tabel
- Lampiran 11 : Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 12 : Analisis Regresi Linier Berganda
- Lampiran 13 : Pengujian Hipotesis
- Lampiran 14 : Nilai f Tabel
- Lampiran 15 : Nilai t Tabel



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 prihal Desa pada Tahun 2014, bertujuan untuk menyampaikan pengakuan serta kejelasan pada desa dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai penekanan peran utama pemerintah Indonesia dalam memajukan pembangunan nasional. Mengejar pembangunan menggunakan dan memberdayakan desa serta menjalankan sistem dari pemerintahnya sendiri dalam setiap pengelolaan desa. Pemberdayaan tersebut untuk menaikkan efesiensi dan efektivitas pelayanan, berguna bagi semua masyarakat Indonesia dalam menata desa dengan baik. Melalui penyaluran dana desa ke semua desa di Indonesia, pembangunan pemerintahan dicapai melalui perencanaan desa.

Suatu kebijakan yang dikeluarkan pada peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan prihal dana desa. Dana desa yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk desa serta dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) untuk dipergunakan dalam pembiayaan tata kelola pemerintahan, implementasi, pembangunan serta pengembangan pemberdayaan rakyat. Sesuai dana desa yang dialokasikan, maka dari tingkat Kabupaten/Kota untuk setiap desa akan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah serta angka kemiskinan. Tujuan dana desa intinya yaitu agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh melalui penyaluran

pendapatan yang lebih merata. Sehingga desa mempunyai kesempatan mengimplementasikan rencana aktivitas pembangunan desa dalam mencapai kesejahteraan warga.

Sistem pemerintahan berperan dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaannya, termasuk dalam pembangunan. Ini adalah langkah-langkah khusus yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Desa juga berhak mengurus dan mengatur masyarakat setempat sesuai dengan kondisi sosial budaya termasuk pengaturan keuangan. Pemerintahan di tingkat desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya pengaturan ini memberikan pertimbangan yang jelas dan konsisten terhadap anggaran pembangunan desa di tingkat nasional dan daerah. Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa berwujud uang dan barang (Arum Cahyati, 2021).

Desa membutuhkan banyak dana untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa sumber pendapatan di tingkat desa: pendapatan asli di tingkat desa, termasuk aset desa (gedung desa, bangunan desa, pasar desa), hasil pengelolaan desa, hasil partisipasi swadaya, gotong royong dan kerjasama dengan pemerintah, dan provinsi, urusan dukungan keuangan kabupaten dan kota di pemerintahan berdasarkan latar belakang, penerimaan pajak sebagian berasal dari dana perimbangan fiskal pusat dan kabupaten atau kota, serta hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat (Bastian, 2015).

Pelaksanaan pembangunan desa oleh pemerintah yang dilakukan di seluruh Indonesia dengan upaya agar alokasi dana desa dapat direalisasikan ke desa. Dana desa yang yang dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 202 Triliun yang jumlahnya sangat besar terbagi dalam tiga tahun (2018, 2019, 2020) dana desa yang dianggarkan meningkat setiap tahunnya dengan penanganan dari pemerintah desa yang sudah dilakukan.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Dana Desa**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>
2018	Rp 60 Triliun
2019	Rp 70 Triliun
2020	Rp 72 Triliun

*Sumber: Kementerian Keuangan RI*

Anggaran dana desa yang dianggarkan pemerintah dengan kenaikan alokasi dana desa yang peningkatannya sangat besar di setiap tahun. Tahun 2018 sebesar Rp 60 Triliun, tahun 2019 meningkat sebesar Rp 70 Triliun, dan untuk tahun 2020 sebesar Rp 72 Triliun. Besarnya anggaran dana desa mempunyai tujuan untuk memajukan pembangunan, pelayanan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa yang diberikan secara prioritas dan diperuntukkan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan diharapkan dapat mengetaskan desa tertinggal dan transmigrasi. Tahun 2019 pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi sudah melebihi target dengan mengetaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan desa berkembang menjadi desa mandiri.

Berdasarkan penggunaan dana desa dalam pengelolaan di setiap tahun yang dipusatkan untuk pembangunan dikatakan masih belum optimal sesuai dengan yang diharapkan, maka dana desa perlu diawasi penggunaannya secara baik supaya

sesuai dengan peruntukannya. Dalam melaksanakan hak, wewenang dan kewajibannya pada pengelolaan dana desa, pemerintah desa dituntut agar dilakukan secara transparansi dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi pada pengelolaannya. Anggaran dana desa yang sudah dicairkan untuk desa dikatakan belum memenuhi sasaran, yang bisa digunakan untuk desa dalam hal pembangunan. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dapat berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan dana desa, yaitu semua aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan keuangan desa yang dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa diharuskan untuk memperhatikan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif, agar tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik dasarnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah, memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas sebagai kendali penuh atas segala tindakan yang pemerintah lakukan, pemerintah berperan sebagai agen menjadi faktor utama bagi pemerintah untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab kepada rakyat atas kinerjanya. Akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pemerintahan yang berhasil dilandaskan oleh banyak faktor yang mempengaruhi kedua aspek tersebut (Widyatama et al., 2017). Akuntabilitas suatu pertanggungjawaban untuk pengelolaan dana desa yang sangat diperlukan untuk mendorong pelaksanaan desa dalam memperjelas sumber daya yang diatur pemerintah agar berjalan dengan baik.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 kecamatan dan 96 desa yang menerima anggaran dana desa. Dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2017 tentang cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa, pembangunan desa yang tertinggal dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut ini merupakan besarnya anggaran dana desa Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.

**Tabel 1.2**  
**Rincian Dana Desa Kabupaten Kepulauan Meranti 2020**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Anggaran Dasar
1	Tebing Tinggi Barat	14	Rp9.279.284.000
2	Tebing Tinggi	5	Rp3.314.030.000
3	Tebing Tinggi Timur	10	Rp6.628.060.000
4	Rangsang	14	Rp9.279.284.000
5	Rangsang Pesisir	11	Rp7.290.866.000
6	Rangsang Barat	12	Rp7.953.672.000
7	Merbau	9	Rp5.965.254.000
8	Pulau Merbau	11	Rp7.290.866.000
9	Tasik Putri Puyu	10	Rp6.628.060.000
<b>Jumlah</b>		<b>96</b>	<b>Rp63.629.376.000</b>

Sumber: DJPK Kemenkeu RI

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020 menerima dana desa sebesar Rp63.629.376.000. Bantuan dana diperoleh dari negara untuk setiap desa di Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari peningkatan dana desa yang diterima. Penerimaan dana desa yang masih lemah terdapat pada akuntabilitas dan penataan penganggaran, serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat dalam pengelolaan dan penyaluran yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dana desa

sangat besar. Kasus penyelewengan dana desa oleh kepala desa dipublikasikan di media adalah salah satu bukti nyata.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti terungkap dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa kepala desa Baran Melintang, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditangkap oleh aparat kepolisian atas dugaan korupsi terhadap pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa pada tahun anggaran 2018 (Goriau.com, Selasa 19/10/2021). Selanjutnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti menangkap tersangka kepala desa Mekong, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti atas kasus penyelewengan dana desa, sumber anggaran dana desa yang diselewengkan adalah alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD) dan bantuan keuangan (Bankeu) tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 (Amanahnews.com, Senin 5/7/2021). Sedangkan untuk di tingkat regional se-Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti, memiliki tingkat realisasi dana desa tertinggi dan realisasi transfer tercepat yang mencapai 79,76%. Akan tetapi dengan tingginya realisasi yang mencapai 79,76%, masih terdapat laporan realisasi tahap sebelumnya dari masing-masing pemerintah desa yang belum menyelesaikan laporan realisasi, karena diketahui saat ini laporan realisasi yang diterima baru terdapat tiga desa (Riaupos.com, Senin 4/10/2021).

Untuk mengatasi masalah penyelewengan dana desa, pemerintah desa wajib mengelola dana desa sesuai dengan tujuan. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia pada pemerintah desa maka dapat mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diperlukan dalam menciptakan akuntabilitas yang baik

dan bertanggungjawab. Kompetensi merupakan ciri khas yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, dan keterampilan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sumber daya manusia menjadi bagian yang diperlukan dalam proses kinerja organisasi (Umaira & Adnan, 2019). Sumber daya manusia adalah hal pokok dalam organisasi yang utama dilakukan untuk memberikan hasil yang optimal dalam melaksanakan kewajiban dan menjalankan tugas organisasi dengan tujuan yang harus dicapai. Kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat sebagai keahlian untuk melakukan atau memperoleh informasi dan hasil. Sumber daya manusia meliputi: pendidikan, pengalaman, pelatihan yang dilakukan dan keterampilan yang dimiliki atau dinyatakan dalam deskripsi jabatan (Arum Cahyati, 2021).

Faktor kedua yaitu partisipasi penganggaran, faktor-faktor yang menentukan efektif dan efesiennya operasi suatu kegiatan organisasi. Partisipasi penganggaran merupakan pengendalian internal atas pemantauan program terkait pendanaan. Partisipasi penganggaran akan menunjukkan seberapa baik aparat pemerintah desa memahami anggaran yang diajukan oleh unit kerjanya. Partisipasi penganggaran adalah bawahan atau pelaksana anggaran yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi proses penganggaran (Nurkhasanah, 2019). Partisipasi penganggaran merupakan suatu upaya dalam mendukung akuntabilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dana desa, pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai rencana kegiatan yang dipersiapkan serta harus sesuai dengan dana desa yang sudah dianggarkan pemerintah. Partisipasi penganggaran merupakan prinsip bahwa setiap warga desa berhak untuk ikut serta dalam setiap keputusan atas kegiatan yang pemerintah desa selenggarakan di tempat tinggalnya.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan bisa secara langsung atau tidak langsung (Sujarweni, 2015).

Faktor selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi informasi dibutuhkan dalam pemberitahuan keuangan yang terpercaya. Penggunaan teknologi informasi meliputi komputer yang membantu mengelola dokumen desa secara lengkap dalam kerja yang dilakukan aparat desa. Prinsip akuntabilitas bisa diterapkan dalam penggunaan yang baik, jika didukung oleh teknologi informasi yang memadai serta dapat dipercaya dalam membantu aparatur desa (Rismawati, 2019). Pada pengelolaan data dalam penggunaan teknologi informasi sebagai informasi akan mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi, karena dengan menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan data akan mendapatkan hasil yang lebih jelas dan tepat. Selain itu, melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan penyusunan laporan keuangan yang akurat akan mengurangi terjadinya kesalahan dan meningkatkan rasa tanggungjawab pemerintah desa dalam mengelola dana desa (Sugiarti & Yudianto, 2017).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyatama (2017) tentang pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sigi yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, sedangkan pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di Kabupaten Sigi. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Sapartiningsih (2018) tentang analisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif signifikan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Perdana (2018) tentang pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian mengatakan bahwa kompetensi aparat pengelolaan dana desa dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Umaira dan Adnan (2019) tentang pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya 2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Juwita Yuni Sarah (2019) tentang pengaruh kompetensi

sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Tanjung Lubuk. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada sampel, jumlah responden serta objek yang digunakan peneliti berbeda, objek dalam penelitian ini adalah Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti karena adanya permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam menggunakan ketentuan yang ditetapkan terkait dengan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi yang kurang memadai serta sarana dan prasarana yang digunakan masih sangat minim dan terbatas. Hal ini menyebabkan belum maksimal akuntabilitas pengelolaan dana desa yang mengakibatkan perangkat desa kesulitan dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban. Selain itu partisipasi penganggaran belum berjalan secara maksimal, masalah kurangnya penerapan transparansi atau keterbukaan terutama kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi dan diharapkan mampu memperbaiki akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik ketiga variabel diatas maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu sebaliknya jika ketiga variabel diatas kurang maksimal, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak maksimal.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat dan perlu diteliti mengenai hal tersebut untuk melihat bagaimana kebenarannya, jadi oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan**

## **Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apakah Partisipasi Penganggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penulis ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Untuk mengetahui dan menguji secara simultan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ke barbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas bagi masyarakat dan bagi peneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemerintah Desa yang diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi yang bermanfaat baik berupa masukan dan dapat digunakan menjadi suatu referensi bagi pihak-pihak yang ada dalam pemerintah serta dapat memberikan pertimbangan mengenai kemampuan terkait Kompetensi

Sumber Daya Manusia, Partusipasi Penganggaran dan Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap pencapaian Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa.

b. Bagi Pihak Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dan sebagai pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun rencana peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Pada bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan dalam melakukan analisis dan pembahasan pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, telaah penelitian terdahulu, model penelitian dan perumusan hipotesis.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi mengenai gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang desain penelitian, objek penelitian, definisi variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik

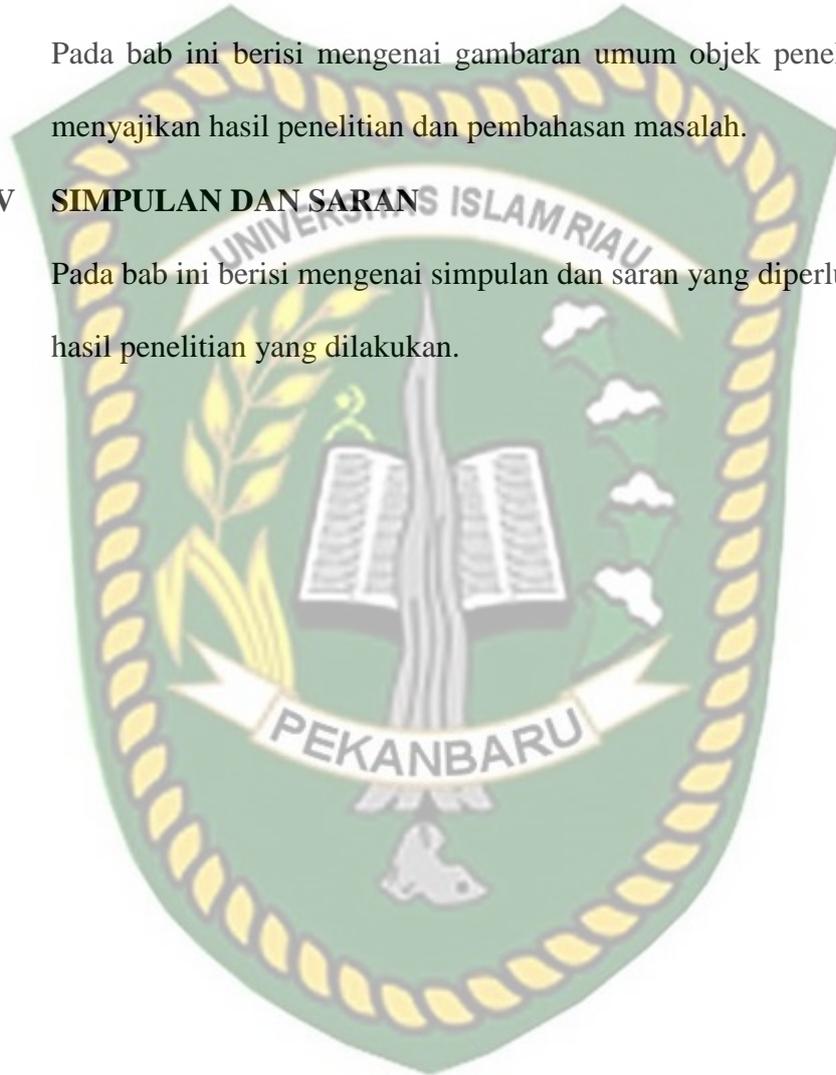
pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, serta menyajikan hasil penelitian dan pembahasan masalah.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi mengenai simpulan dan saran yang diperlukan dalam hasil penelitian yang dilakukan.



## BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### 2.1 Telaah Pustaka

#### 2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut (Meckling & Jensen, 1976) teori agensi menjelaskan mengenai hubungan kerja antara *agent* dan *principal*. *Agent* adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai kepentingan dari *principal*, sedangkan *principal* adalah pihak yang memberikan perintah, mengawasi dan memberikan penilaian atas tugas yang dilakukan oleh agen. Teori agensi berfokus pada permasalahan yang terjadi diperusahaan sebagai bentuk pemisahan kekuasaan antara prinsipal dengan agen dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Teori ini membantu dalam melaksanakan mekanisme *corporate governance* sebagai bentuk dari kontrol pihak prinsipal terhadap agen di perusahaan (Panda & Leepsa, 2017). Teori agensi terjadi karena masalah keagenan dari tujuan dan pembagian kerja yang berbeda antara pihak-pihak yang bekerja, sehingga teori agensi memberikan alasan kuat mengapa mempertahankan mekanisme kontrol diperlukan (Homayoun, 2015).

Pemisahan antara kepemilikan dengan pengawasan menyebabkan manajer sering bertindak menyimpang dari kepentingan pemilik. Hal ini menimbulkan masalah keagenan, yaitu manajer mungkin tidak bertindak demi kepentingan pemilik karena perbedaan motivasi. Prinsipal, bertujuan untuk mengontrol dan memantau aktivitas para agen. Pemisahan kepemilikan menyebabkan pada arah pertumbuhan risiko bahwa manajer akan melakukan penyimpangan dan bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Keterkaitan dengan adanya teori agensi dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana pemerintah desa disini bertindak sebagai pihak yang diberi amanah atau wewenang (*agent*) dalam menyajikan laporan terkait dengan pengelolaan dana desa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selain itu masyarakat merupakan prinsipal, sehingga pemerintah desa tidak hanya mempertanggungjawabkan pengelolaan desa kepada pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kepala desa dan perangkat desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan desa diharapkan mampu melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dan transparansi memandang perlu bahwa yang memegang posisi tertinggi di pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan atas kinerjanya kepada publik dan menyediakan informasi secara terbuka mengenai pengelolaan dana desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori agensi adalah tuntutan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan tujuan memberikan yang terbaik dari setiap pengelolaan sumber daya yang diberikan.

### 2.1.2 Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikembangkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Secara tertib uang desa dikelola sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam peraturan yang sudah

ditentukan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat dan memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 5 tentang dana desa yang dialokasikan untuk desa oleh pemerintah. Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan jumlah desa dan penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis di setiap kabupaten/kota.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota kepada desa dilakukan melalui pembukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Kas tingkat Desa. Pendanaan tingkat desa dilaksanakan secara berangsur-angsur selama tahun anggaran berjalan, untuk ketetapan: 40% tingkat pertama bulan April, 40% untuk tingkat kedua bulan Agustus, dan 20% untuk tingkat ketiga bulan Oktober. Dana desa pada dasarnya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memberikan pendanaan kepada instansi yang bertanggungjawab atas desa. Penggunaan dana desa dioptimalkan untuk pembiayaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi: pengembangan pendidikan dasar, kesehatan dan pelayanan infrastruktur. Dalam pengetasan kemiskinan, dana tingkat desa dapat dipergunakan untuk melengkapi kepentingan dasar seperti sandang, pangan dan papan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dana desa nonprioritas digunakan selama kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah tercapai. Pelaksanaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengenai sumber pendapatan desa yaitu:

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, kekayaan desa hasil swadaya dan hasil gotongroyong serta pendapatan asli desa
2. Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara dari Anggaran
3. Distribusi pendapatan dari pajak daerah kabupaten/kota dan biaya tambahan
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perataan dari dana perataan yang dihasilkan kabupaten/kota
5. Dukungan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
7. Pendapatan desa lainnya yang sah

### **2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan penyelenggaraan keuangan desa meliputi berbagai kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran desa. Penyelenggaraan keuangan desa merupakan siklus yang terintegrasi dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Anggaran desa dikendalikan menurut prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Prinsip pengendalian keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi dengan bantuan pemanfaatan masing-masing desa agar pengendalian, pelaksanaan perbaikan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan penguatan masyarakat desa dapat berjalan sesuai rencana, sehingga visi dan misi desa dapat direalisasikan.

### 2.1.3.1 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan penyelenggaraan keuangan desa terletak di antara kepala desa yang didukung Penyelenggara Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) (Kementrian Dalam Negeri, 2014). Kepala desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa yang memiliki aset desa tersendiri atau terpisah (Yuliansyah & Rusmianto, 2015). Tentang tugas kepala desa. Menurut undang-undang desa, kewenangan administratif kepala desa dalam mengelola desa yaitu:

1. Keputusan regulasi terkait penegakan anggaran desa
2. Memutuskan dan menerapkan teknologi pengelolaan keuangan desa (PTPKD)
3. Menugaskan petugas untuk memungut pajak desa
4. Persetujuan pengeluaran biaya untuk kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
5. Melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang menimbulkan biaya dengan pengeluaran anggaran desa

Dalam mengelola keuangan desa pemerintah desa dibantu Penyelenggara Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dari unsur perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

1. Sekretaris desa

Sekretaris desa bertindak sebagai koordinator penyelenggara teknis pengelolaan keuangan dan melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan pedoman pengelolaan anggaran desa

- b. Rancangan peraturan desa APBDesa, revisi APBDesa, pelaksanaan dan tanggungjawab APBDesa
- c. Konfirmasi pelaksanaan kegiatan ditentukan oleh anggaran desa
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- e. Melakukan review atau penelaahan terhadap masukan dan keluaran APBDesa

## 2. Kepala seksi

Kepala seksi bertindak mengenai penyelenggara kegiatan berdasarkan tugasnya, untuk tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan terhadap kewajiban penyelenggaraan
- b. Menjalankan kegiatan lembaga masyarakat yang ditetapkan dalam APBDesa
- c. Menjalankan kegiatan pembelanjaan yang membebani anggaran
- d. Mengontrol pelaksana kegiatan
- e. Melaporkan kemajuan kegiatan kepada kepala desa
- f. Menyiapkan dokumen anggaran biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelenggaraan

## 3. Bendahara

Bendahara dijabat oleh staf keuangan. Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut: dalam penyelenggara bendahara harus bertanggungjawab menerima dan membelanjakan pendapatan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan anggaran desa.

## 2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

### 2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas Publik

Dalam bahasa Inggris yaitu (*account-tability*) atau akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang harus diberikan. Oleh karena itu kewajiban adalah satu atau lebih kondisi yang dapat dijelaskan. Menurut (Banga, 2017), warga negara bertanggungjawab kepada pembuat kebijakan. Seperti tanggungjawab yang dituntut pemerintah dalam upaya pembuatan kebijakan dan sebagai kekuatan masyarakat, akuntabilitas yang diperlukan pemerintah atau eksekutif sebagai pembuat kebijakan kepada masyarakat sangat membantu dalam memahami dan mengetahui aspek-aspek pemerintah dalam menerapkan kebijakan mereka dalam usahanya, untuk memenuhi keinginan pemerintah dan keinginan masyarakat.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Prihal desa, disebutkan dalam hasil akhir bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah pelaporan dan pengungkapan kepada pihak yang berkepentingan atas kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini pelaporan hak publik baik dalam rangka pelaksanaan untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu hak untuk melihat seberapa besar pelayanan publik yang telah diberikan oleh pemerintah melalui pengendalian anggaran. Indikator kinerja adalah indikator kuantitatif dan kualitatif yang mewakili tujuan atau tingkat pencapaian yang ditentukan dengan indikator lainnya yaitu:

1. *Inputs*, merupakan ukuran kinerja berdasarkan jumlah biaya, bakat, materi, periode, teknologi lainnya dipergunakan dalam melakukan dan menjalankan kegiatan
2. *Output*, merupakan ukuran kinerja suatu produk yang dibuat atau diterima dari suatu kegiatan
3. *Outcome*, merupakan ukuran kinerja menurut tingkat hasil. Hasil adalah kinerja yang tergantung pada tingkat keberhasilan yang dapat dicapai atau hasil dari program dan kegiatan yang dilakukan
4. *Benefit*, merupakan ukuran kinerja menurut tingkat nilai tambah atau nilai tambah bagi pemerintah daerah atau masyarakat dari hasil tersebut
5. *Impact*, merupakan ukuran kinerja yang dapat dilihat efeknya dalam berbagai situasi dari manfaat yang ingin dicapai

Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban pihak pemegang amanah dalam mempertanggungjawabkan, mewakili, melaporkan dan mengungkapkan setiap tindakan, tindakan tersebut yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang berhak dan berkewajiban atas pertanggungjawab tersebut. Ada beberapa jenis tanggungjawab publik, khususnya tanggungjawab untuk menangani anggaran untuk otorisasi yang lebih baik (tanggungjawab vertikal) dan tanggungjawab kepada masyarakat luas (tanggungjawab horizontal) (Mardiasmo, 2018). Ada empat dimensi dari pertanggungjawaban organisasi sektor publik yang harus dipenuhi yaitu:

1. Kejujuran dan tanggungjawab publik

Kejujuran dikaitkan dengan pencegahan penyalahgunaan jabatan, bahkan tanggungjawab hukum dikaitkan dengan memastikan kepatuhan terhadap pedoman dan pedoman hukum yang diperlukan dalam penggunaan sumber investasi publik.

2. Tanggungjawab proses

Tanggungjawab proses terkait dengan strategi yang digunakan dalam melaksanakan kewajiban cukup tepat dalam hal kecukupan informasi akuntansi, struktur informasi manajemen dan strategi administrasi.

3. Tanggungjawab program

Tanggungjawab program dikaitkan dengan masalah dan tujuan yang sulit dan cepat dalam mempertimbangkan program yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Tanggungjawab kebijakan

Tanggungjawab kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat, daerah atau kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap masyarakat luas.

#### 2.1.4.2 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa sesuai dengan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi & Dharma, 2018). Akuntabilitas pengelolaan dana desa mengacu pada keharusan untuk mempertanggungjawabkan kepada

kepala desa dalam bentuk laporan atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan perilaku kepala desa. Suatu pertanggungjawaban desa yang diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang (Atiningsih & Ningtyas, 2019).

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban penyelenggaraan dana desa adalah tanggungjawab dalam pelaksanaan desa yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa, dan kinerja kepala desa dijelaskan kepada bupati dan masyarakat desa dalam bentuk pengelolaan dana desa. Program pelaksanaan kegiatan desa meliputi tata cara, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa dan sesuai dengan prinsip tersebut.

#### **2.1.4.3 Aspek-Aspek Akuntabilitas**

Menurut (Banga, 2017) menyatakan bahwa ada beberapa aspek dari suatu pertanggungjawaban terdiri dari yaitu:

1. Tanggungjawab merupakan hubungan dalam komunikasi dua arah atau merupakan sebuah kontrak antara dua pihak
2. Tanggungjawab berorientasi hasil. Dalam struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini, tanggungjawab berfokus pada hasil, bukan *input* ataupun *output*, melainkan kepada *outcome*
3. Tanggungjawab membutuhkan laporan. Laporan tersebut adalah tumpuan dari pertanggungjawaban

4. Tanggungjawab tidak ada artinya tanpa konsekuensi yang digunakan dalam membahas dan mendefinisikan tanggungjawab
5. Tanggungjawab menciptakan kinerja, tujuannya untuk menciptakan kinerja bukan untuk mencari kesalahan atau menghukum

Dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dalam akuntabilitas itu sangat penting dan diperlukan dalam tujuan meningkatkan kinerja aparat, selain itu aspek akuntabilitas dibutuhkan dalam pemerintah desa untuk sebuah pemberitahuan lebih jelas atau pertanggungjawaban laporan keuangan kepada lapisan masyarakat.

#### **2.1.4.4 Indikator Akuntabilitas**

Menurut (Banga, 2017) dalam (Nurkhasanah, 2019) indikator dari terlaksananya akuntabilitas yaitu:

1. Adanya kesesuaian pada penerapan dan langkah-langkah dalam pelaksanaan
2. Adanya hukuman, hukuman dalam pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan karena suatu kelalaian
3. Adanya informasi dan hasil yang tertukar

#### **2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut (Umaira & Adnan, 2019) kompetensi tersebut merupakan ciri khas yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sumber daya manusia menjadi bagian yang diperlukan dalam proses kinerja organisasi. Menurut (Kharis, 2019) dalam (Nurkhasanah, 2019) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan, pelatihan dan pengalaman.

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dari suatu lembaga, sehingga harus diperhatikan sumber daya manusia dilaksanakan dengan sangat baik agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan suatu organisasi.

Kompetensi sumber daya manusia meliputi keahliannya, keahlian orang-orang atau masyarakat dalam organisasi, atau dalam bentuk pelaksanaan kekuasaan dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan (Sugiarti & Yudianto, 2017). Kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat sebagai keahlian untuk melakukan atau memperoleh informasi dan hasil. Sumber daya manusia meliputi: pendidikan, pengalaman, pelatihan dan keterampilan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas yang diberikan (Arum Cahyati, 2021). Sedangkan menurut (Nurkhasanah, 2019) dapat mengemukakan tiga indikator kompetensi sumber daya manusia yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*) merupakan suatu pemahaman yang dimiliki seorang tenaga kerja dalam melakukan tugasnya sesuai dengan posisi tertentu. Pemahaman dalam melaksanakan pekerjaan yang dimiliki seseorang digunakan dalam keadaan nyata. Oleh karena itu, tenaga kerja dengan pemahaman yang cukup dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan menjalankan kewajibannya.

2. Keterampilan

Keterampilan (*skill*) merupakan usaha dalam melakukan pekerjaan dan tanggungjawab yang dibebankan dengan menggunakan keterampilan dan

pemahaman yang dimiliki sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan mudah dan mencapai hasil dengan tujuan yang diharapkan.

### 3. Prilaku/sikap

Sikap (*attitude*) adalah perilaku tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan dan tanggungjawab yang diberikan atas segala risikonya dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia bukan hanya tentang masalah pendidikan tetapi juga tentang keahlian dari aparat desa seperti wawasan dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan dan melaksanakan pekerjaan yang diberikan, sehingga menciptakan aparat desa yang baik dan bertanggungjawab dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

#### 2.1.6 Partisipasi Penganggaran

Anggaran merupakan perkiraan kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang ditunjukkan dalam ukuran finansial. Penganggaran merupakan prosedur dalam mempersiapkan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tingkatan yang cukup rumit yang berisi perbedaan kebijakan yang tinggi. Penganggaran merupakan prosedur kebijakan dalam organisasi sektor publik. Anggaran publik berisi program kegiatan yang biasa ditampilkan dalam bentuk program penerimaan dan belanja dalam ukuran yang berhubungan dengan uang. Anggaran berisi perkiraan mengenai organisasi yang akan dilakukan pada periode akan datang (Mardiasmo, 2018).

Partisipasi penganggaran merupakan suatu pilar bahwa setiap warga desa yang ada di desa berhak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan dan

kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Keikutsertaan masyarakat tersebut bisa dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dalam memilih keputusan. Partisipasi penganggaran berfungsi sebagai pengendalian internal yang dapat mencapai suatu tujuan berkaitan pada program-program pendanaan desa dan pengawasan (Riyadi & Kurnadi, 2020). Partisipasi anggaran menunjukkan bahwa unit kerja aparat pemerintah desa menunjukkan pada luasnya partisipasi dalam memahami anggaran. Partisipasi anggaran dalam proses penyusunan anggaran adalah proses dimana pelaksana anggaran mempunyai pengaruh dalam penyusunan anggaran dan diberikan kesempatan untuk tertib dalam pelaksanaan anggaran (Nurkhasanah, 2019).

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi penganggaran adalah proses di mana masyarakat desa secara langsung atau tidak langsung berpartisipasi dalam mengambil keputusan dalam suatu tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan.

### **2.1.7 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

#### **2.1.7.1 Pengertian Teknologi Informasi**

Menurut (Kadir, 2014) Teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronik, termasuk dalam menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronik, termasuk kata-kata, angka dan gambar. Teknologi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melakukan lebih banyak tugas dalam pembuatan data, seperti menangkap, menetralkan, menyimpan, mengambil, memanipulasi serta menampilkan data. Selain itu, teknologi informasi tidak hanya mencakup teknologi

komputer (perangkat keras dan lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi.

Berdasarkan dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan suatu organisasi yang bermanfaat dalam meringankan kewajiban sumber daya manusia. Teknologi informasi digunakan untuk meringankan sistem dalam penyimpanan dan pengelolaan data. Selain itu teknologi informasi juga menyajikan data informasi dalam pengambilan suatu keputusan serta memudahkan dan mempercepat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkaitan dalam pemerintahan desa.

#### **2.1.7.2 Jenis-jenis Teknologi Informasi**

Teknologi informasi terdiri dari dua macam yaitu: perangkat keras dan lunak. Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, printer, keyboard. Menurut (Kadir, 2014) teknologi informasi terbagi menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Teknologi masukan

Teknologi masukan adalah perangkat yang digunakan untuk menangkap data/informasi dari sumber aslinya

2. Teknologi keluaran

Teknologi keluaran memainkan peran besar dalam informasi yang disajikan di monitor

3. Teknologi perangkat lunak

Teknologi perangkat lunak *software* dan program yang dibutuhkan untuk membuat informasi. Program adalah seperangkat instruksi untuk mengendalikan perangkat keras komputer

4. Teknologi penyimpanan

Penyimpanan peralatan yang digunakan untuk menyimpan data

5. Teknologi telekomunikasi

Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan terjadinya komunikasi jarak jauh

6. Mesin pemroses

Teknologi yang berfungsi mengenali informasi data/program merupakan bagian penting dalam mengeksekusi program (seperti komponen CPU)

### 2.1.7.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan kumpulan dari beberapa elemen teknologi seperti komputer, peralatan (*hardware* dan *software*) database, jaringan dan jenis teknologi lain (Sugiarti & Yudianto, 2017). Pemanfaatan teknologi informasi penting untuk memudahkan pekerjaan dalam mengolah data menjadi informasi sebagai kebutuhan antara pemangku kepentingan dalam mengatasi tindakan atau memutuskan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat (Aulia, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola data sebagai informasi mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengolahan data karena data diolah melalui teknologi informasi akan lebih tepat (Arum Cahyati, 2021).

Menurut (Komarasari, 2016) meningkatkan kinerja organisasi/instansi pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan percepatan

implementasi *e-government* sangat penting dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan hubungan pemerintah dan pihak lainnya. Pemanfaatan informasi memberikan bentuk hubungan baru. *E-government* dan komputer memiliki kedudukan dalam kegiatan yang sangat penting dan bermanfaat untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah. *E-government* mempunyai manfaat bagi masyarakat yang dapat dinikmati sebagai berikut:

1. Pelayanan masyarakat yang baik dari segi fasilitas
2. Pemerintah dan masyarakat menciptakan interaksi antara pelaku bisnis
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah didapat
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien

Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah suatu kegiatan yang menggunakan teknologi sebagai alat untuk membantu dan memudahkan setiap proses kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan informasi yang terbaik kepada masyarakat.

#### **2.1.7.4 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut (Nurkhasanah, 2019) indikator pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya software pendukung
2. Ketersediaan jaringan internet
3. Dimanfaatkan sesuai ketentuan
4. Proses terkomputerisasi

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Widyatama, (Jurnal 2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Explanatory Research	Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. Sedangkan kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa.
2	Perdana (Skripsi 2018)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul	Kuantitatif	Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Kompetensi Aparat dan Komitmen Organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul.
3	Sapartiningsih (Jurnal 2018)	Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi	Kualitatif Kuantitatif	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan memiliki pengaruh

		Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa		positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
4	Nurkhasanah (Skripsi 2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)	Kuantitatif	Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Kompetensi Aparatur dan Partisipasi Masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.
5	Umaira, Adnan (Jurnal 2019)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kab Aceh Barat Daya 2019)	Kuantitatif	Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas Pengelolaan dana Desa di Kabupaten Aceh Barat Daya 2019.
6	Juwita Yuni Sarah (Skripsi 2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan	Kuantitatif	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh

		Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Tanjung Lubuk		signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung Lubuk.
7	Kurnandi (Jurnal 2020)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka	Kuantitatif Deskriptif	Partisipasi Penganggaran memiliki Pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model dari rancangan peneliti untuk mengembangkan hipotesis dari objek permasalahan. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini mengilustrasikan variabel bebas (independen) yang terdiri dari tiga yaitu kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pemanfaatan teknologi informasi pada variabel terikat (dependen) yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi aparatur pengelolaan dana tingkat desa merupakan keterampilan yang diperlukan bagi aparat desa, sehingga semua aspek pembangunan dapat didorong melalui penggunaan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam pembangunan desa terbaik (Perdana, 2018). Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mengelola keuangan desa dan tanggungjawabnya. Pemerintah desa yang terampil tentunya memiliki kemampuan mengelola keuangan desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di tingkat desa. Sebaliknya, akuntabilitas tentu saja tidak dapat tercapai jika lembaga di tingkat desa tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya (Umaira & Adnan, 2019).

Berdasarkan uraian diatas bahwa pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa untuk mencapai akuntabilitas harus memiliki keahlian dan pengetahuan untuk mengelola keuangan desa. Semakin besar kompetensi yang dimiliki dari sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa, maka semakin baik rasa tanggungjawab pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Spartiningsih et al., 2018) menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 2. Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Nurkhasanah, 2019) mendefinisikan bahwa partisipasi penganggaran adalah salah satu pengelolaan dana desa yang berfungsi sebagai pengendalian internal atas pengawasan program terkait dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dapat membantu mengawasi pemerintah desa dalam menyiapkan anggaran. Sehingga partisipasi penganggaran berjalan efektif dan efisien dan menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik.

Menurut (Sujarweni, 2015) partisipasi penganggaran merupakan prinsip dari setiap warga desa yang berhak untuk ikut serta dalam setiap kegiatan dan mengambil keputusan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. Jadi dapat dikatakan bahwa partisipasi penganggaran adalah bentuk dari tanggungjawab pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dalam membantu dan mengawasi pekerjaan pemerintah desa dalam penyusunan anggaran yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Sapartiningsih et al., 2018) menunjukkan hasil bahwa Partisipasi Penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

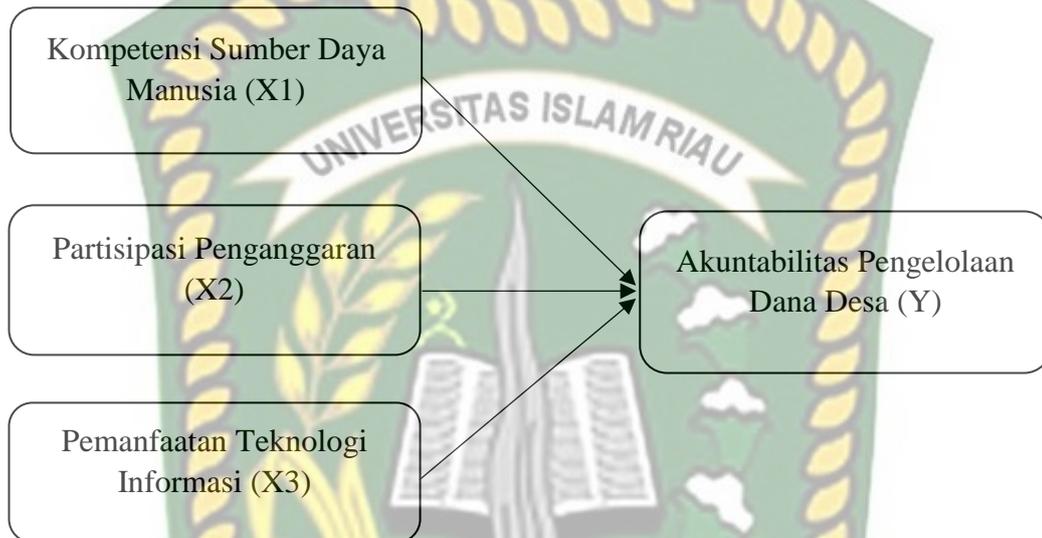
### 3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Aulia, 2018) pemanfaatan teknologi informasi merupakan bagian penting dalam menjalankan suatu pekerjaan dalam mengolah data yang menjadi suatu informasi serta memudahkan pemerintah desa dalam menginput data sebagai kebutuhan dalam mengatasi tindakan atau memutuskan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi sangat berguna dalam mengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data informasi akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dari setiap pengolahan data yang diolah karena data yang diolah dengan teknologi informasi tersebut akan lebih detail dan akurat.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa memudahkan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa atas kegiatan yang dilaksanakan (Perdana, 2018). Dapat dikatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi penting untuk mempermudah kerja pengelolaan data dalam informasi bagi kebutuhan pihak-pihak yang berkepenting untuk bertindak atau mengambil keputusan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Sugiarti & Yudianto, 2017) menunjukkan hasil bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka model kerangka pemikiran pada hubungan masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1  
Model Penelitian**



#### 2.4 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2019) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data yang terkumpul. Hipotesis mengenai rumusan masalah penelitian yang menjelaskan fenomena dari keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi, bentuk kalimat hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

H<sub>2</sub> : Partisipasi Penganggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

H<sub>3</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

H<sub>4</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode survey. Menurut (Sugiyono, 2019) Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian berbasis empiris (data spesifik) yang mempelajari data berupa angka-angka yang akan diuji, menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, terkait dengan pertanyaan penelitian untuk menarik kesimpulan. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2019) metode survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden yang digunakan untuk memperoleh data dari beberapa tempat tertentu dan proses pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner.

### **3.2 Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini dilakukan pada desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mendapatkan dana desa.

### **3.3 Definisi Variabel Penelitian**

#### **3.3.1 Variabel Bebas (Independen)**

Menurut (Sugiyono, 2019) variabel bebas (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

##### **1. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut (Kharis, 2019) dalam (Nurkhasanah, 2019) kompetensi adalah kemampuan perangkat desa untuk mengetahui peraturan pengelolaan dana

tingkat desa dalam mengelola keuangan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawab yang diberikan melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai.

## 2. Partisipasi Penganggaran

Menurut (Sujarweni, 2015) dalam (Nurkhasanah, 2019) partisipasi merupakan gambaran karakter serta keterlibatan yang berperan atau tidak berperan dalam suatu aktivitas yang mengungkapkan bahwa prinsip setiap masyarakat di desa berhak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

## 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut (Perdana, 2018) teknologi informasi berupa kumpulan yang berupa teknologi seperti komputer, perangkat (*hardware, software*) *database* jaringan dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan keadaan maupun sikap dalam menggunakan teknologi dalam menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya.

### 3.3.2 Variabel Terikat (Dependen)

Menurut (Sugiyono, 2019) variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (dependen) penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut (Mardiasmo, 2018) dalam (Nurkhasanah, 2019) Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi kewajiban pemerintah desa dalam memberikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan dan pengungkapan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel Penelitian**

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR
Kompetensi Sumber Daya Manusia	Pengetahuan ( <i>Knowledge</i> )	- Pengetahuan - Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan
	Kemampuan ( <i>Skill</i> )	- Keahlian teknis - Kemampuan mencari solusi
	Sikap ( <i>Attitude</i> )	- Inisiatif dalam bekerja - Keramahan dan kesopanan
Partisipasi Penganggaran	Pengambilan Keputusan	- Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa
	Pelaksanaan Anggaran	- Masyarakat mengusulkan rencana anggaran - Masyarakat terlibat dalam rapat paripurna - Masyarakat terlibat dalam mengawasi dana desa - Masyarakat memberikan penilaian pelaksanaan anggaran
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sarana dan Prasarana	- Kecukupan jumlah komputer yang ada dan tersedia - Adanya software pendukung - Ketersediaan jaringan internet
	Sasaran	- Dimanfaatkan sesuai ketentuan - Proses terkomputerisasi
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kejujuran dan Hukum	- Kejujuran dan keterbukaan informasi - Kepatuhan dalam pelaporan
	Proses	- Kesesuaian prosedur - Kecukupan informasi - Ketetapan penyampaian laporan

Sumber: (Nurkhasanah, 2019)

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2019) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah seluruh Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari 9 Kecamatan dan sebanyak 96 Desa yang mendapatkan dana desa.

#### 3.4.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2019) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dipilih berdasarkan metode pengambilan sampel *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan setiap anggota dalam populasi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel, dengan pendekatan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang dipilih sebanyak 32 desa. Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel yaitu biaya dan waktu, alasannya karena Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari beberapa pulau. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa (kaur keuangan) serta kasi pemerintahan desa.
2. Masa kerja minimal 1 tahun.

**Tabel 3.2**  
**Daftar Sampel dan Responden Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti**

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	JUMLAH RESPONDEN
1	Banglas	Tebing Tinggi	4
2	Banglas Barat	Tebing Tinggi	4
3	Alahair	Tebing Tinggi	4
4	Alahair Timur	Tebing Tinggi	4
5	Sesap	Tebing Tinggi	4
6	Segomeng	Rangsang Barat	4
7	Bantar	Rangsang Barat	4
8	Anak Setatah	Rangsang Barat	4
9	Lemang	Rangsang Barat	4
10	Bokor	Rangsang Barat	4
11	Sungai Cina	Rangsang Barat	4
12	Melai	Rangsang Barat	4
13	Telaga Baru	Rangsang Barat	4
14	Bina Maju	Rangsang Barat	4
15	Sialang Pasung	Rangsang Barat	4
16	Permai	Rangsang Barat	4
17	Mekarbaru	Rangsang Barat	4
18	Alai	Tebing Tinggi Barat	4
19	Tenan	Tebing Tinggi Barat	4
20	Insit	Tebing Tinggi Barat	4
21	Tanjung	Tebing Tinggi Barat	4
22	Kundur	Tebing Tinggi Barat	4
23	Mekong	Tebing Tinggi Barat	4
24	Batang Malas	Tebing Tinggi Barat	4
25	Mantiasas	Tebing Tinggi Barat	4
26	Gogok Darussalam	Tebing Tinggi Barat	4
27	Maini Darul Aman	Tebing Tinggi Barat	4
28	Alai Selatan	Tebing Tinggi Barat	4
29	Baran Melintang	Pulau Merbau	4
30	Renak Dungun	Pulau Merbau	4
31	Pangkalan Balai	Pulau Merbau	4
32	Semukut	Pulau Merbau	4
<b>TOTAL</b>			<b>128</b>

Sumber: Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2017

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data berupa kuesioner yang didapatkan dengan mengumpulkan langsung datanya dari sumber asli dan dilakukan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan maksud peneliti. Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa (kaur keuangan), serta kasi pemerintahan yang terlibat dalam pengelolaan dana desa.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berisi informasi yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer. Dalam mendapatkan data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik survey yaitu dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden di desa Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan menggunakan skala likert 5 angka. Kuesioner yang digunakan peneliti adalah kuesioner dari penelitian Nurkhasanah 2019, alasannya karena penelitian tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya dan untuk mengurangi kesalahan statistik dan tempat penelitian yang dilakukan berbeda. Selain itu, penelitian ini dipilih berdasarkan metode survey

bahwa metode ini lebih efektif dalam mengurangi resiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar. Selanjutnya responden diminta untuk menjawab pernyataan dengan nilai yang telah ditetapkan yaitu:

**Tabel 3.3**  
**Skala Likert**

Skor	Kriteria
5	Sangat Setuju (SS)
4	Setuju ((S)
3	Kurang Setuju (KS)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

### 3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer *Statistical Product and Service Solution* 25. Selanjutnya setelah data penelitian terkumpul, maka langkah berikutnya dilakukan analisis data. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis.

#### 3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan, sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019). Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data sampel dan tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. Statistik deskriptif digunakan dalam memberikan sebuah gambaran mengenai responden

penelitian jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan dan lama masa kerja. Selain itu, dalam statistik deskriptif yang digunakan terdiri dari minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi (Ghozali, 2018).

### 3.7.2 Uji Kualitas Data

#### 3.7.2.1 Uji Validitas

Validitas data penelitian digunakan untuk proses yang digunakan untuk mengukur sah atau valid suatu kuesioner. Suatu kuesioner dalam penelitian dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji validitas yang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara nilai *r* hitung dengan *r* tabel, caranya dengan melihat *pearson correlation*. Jika setiap butir-butir pertanyaan mempunyai tingkat korelasi signifikansi lebih besar dari 0,05 maka pertanyaan tersebut dikatakan tidak valid, sedangkan jika setiap butir-butir pertanyaan mempunyai tingkat korelasi signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka pertanyaan tersebut dikatakan valid.

#### 3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengungkapan tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Pengukuran pertanyaan hanya sekali menyebar kuesioner kepada responden kemudian hasilnya diukur korelasinya antar jawaban pada pertanyaan menggunakan bantuan program *IBM SPSS 25* dengan fasilitas *Cronbach Alpha (a)*. Dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika tingkat reliabilitas pada *Cronbach Alpha*  $> 0,70$  maka

pertanyaan tersebut dapat diterima atau dikatakan reliabel. Sedangkan jika tingkat reliabilitas pada *Cronbach Alpha*  $< 0,70$  maka pertanyaan tersebut tidak diterima atau dikatakan tidak reliabel (Ghozali, 2018).

### 3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan analisis statistik inferensial yang digunakan untuk penelitian, terkhusus statistik parametrik. Pengujian dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik dijelaskan melalui uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heterokedastisitas, ketiga uji tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### 3.7.3.1 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018) Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui dan menguji variabel pengganggu atau nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Uji normalitas data dapat menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test* (KS). Dasar pengambilan keputusan dari uji *Kolmogorov-Smirnov* yaitu:

1. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka nilai residual berdistribusi normal
2. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka nilai residual tidak berdistribusi normal

#### 3.7.3.2 Uji Multikolonieritas

Menurut (Ghozali, 2018) Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi menemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas dalam model regresi

dilakukan nilai *Tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Multikolinearitas diindikasikan jika nilai *Tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $> 10$  artinya menunjukkan adanya multikolonieritas. Sebaliknya jika nilai *Tolerance*  $> 0.10$  atau sama dengan nilai VIF  $< 10$  artinya menunjukkan tidak ada atau tidak terjadi gejala multikolonieritas.

### 3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji perbedaan varian dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam suatu model regresi. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya ada, disebut homeskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homeskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu X adalah residual ( $Y$  prediksi –  $Y$  sesungguhnya) yang telah di-studentized.

1. Jika ada pola yang jelas (bergelombang, melebur, kemudian menyempit), pada gambar *scatterplot*, maka terjadinya gejala heteriskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. <sup>1</sup>

Sedangkan pengujian heteroskedastisitas yang menggunakan alternatif dengan uji glejser yaitu bertujuan untuk menguji keakuratan atau ada keraguan dalam hasil gambar *scatterplot*. Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu model regresi linear tidak efesien dan akurat. Salah satu cara yang paling akurat untuk

mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen (bebas) dengan nilai absolut residualnya. Dasar pengambilan keputusan dari uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser yaitu:

1. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas
2. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih kecil dari 0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### 3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengungkapkan pengaruh antara beberapa variabel independen dan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pemanfaatan teknologi informasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefesien Regresi Kompetensi Sumber Daya Manusia

$\beta_2$  = Koefesien Regresi Partisipasi Penganggaran

$\beta_3$  = Koefesien Regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi

$X_1$  = Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

$X_2$  = Variabel Partisipasi Penganggaran

$X_3$  = Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

$e$  = Tingkat Kesalahan (*error*)

### 3.7.5 Pengujian Hipotesis

#### 3.7.5.1 Koefesien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut (Ghozali, 2018) koefesien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengukur kemampuan model penelitian dalam menjelaskan perubahan variabel terikat (dependen). Nilai koefesien determinasi adalah nol dan satu. Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen terlalu terbatas. Nilai yang mendekati 1 ( $R^2$ ) berarti variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi perubahan variabel dependen.

#### 3.7.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Menurut (Ghozali, 2018) uji kelayakan model (uji F) dilakukan untuk uji apakah variabel independen dapat menjelaskan variabel dengan baik atau apakah model yang digunakan berpengaruh secara simultan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat kepercayaan 5%. Selain itu untuk mencari F tabel menggunakan rumus yaitu  $F_{tabel} = (k ; n-k)$  k adalah jumlah variabel bebas (independen) dan n adalah jumlah banyaknya sampel. Kriteria pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai  $F$  hitung  $> F$  tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai  $F$  hitung  $< F$  tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 3.7.5.3 Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t)

Uji signifikan secara parsial (uji t) untuk menguji hipotesis dengan menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan berdasarkan perhitungan nilai dari masing-masing koefisien regresi yang digunakan. Dasar pengambilan keputusan uji t parsial adalah jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen, sebaliknya jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu untuk mencari t tabel menggunakan rumus yaitu  $t \text{ tabel} = ( \alpha/2 ; n-k-1 )$   $\alpha$  adalah 0,05, n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai t hitung  $> t$  tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga menunjukkan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai t hitung  $< t$  tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi salah satu kabupaten termuda yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12, Tanggal 16 Januari 2009. Kabupaten Kepulauan Meranti ibukotanya adalah Selatpanjang, yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 kecamatan dan sebanyak 96 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Rangsang dan Tebing Tinggi Barat memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 14 desa dan Kecamatan Tebing Tinggi memiliki desa sedikit yaitu 5 desa.

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada kordinat antara sekitar  $0^{\circ}42'30''-1^{\circ}28'0''$  LU, dan  $102^{\circ}12'0''-103^{\circ}10'0''$  BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia, Malaysia dan Singapore (IMS-GT). Secara tidak langsung, sudah menjadi daerah *Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ)* Batam-Tanjung Balai Karimun. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah  $3.707,84 \text{ km}^2$  dengan besarnya wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur yaitu dengan luas  $768,00 \text{ km}^2$  dan Kecamatan Tebing Tinggi sebagai kecamatan terkecil dengan luas  $81,00 \text{ km}^2$ .

Batasan wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu:

- Bagian Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis
- Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
- Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun

#### 4.1.2 Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik adalah 206.116 jiwa yang terdiri dari 106.502 jiwa penduduk laki-laki dan 99.614 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Tebing Tinggi dan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Tebing Tinggi Timur. Pertumbuhan penduduk kabupaten kepulauan meranti menurut data registrasi penduduk dan proyeksi penduduk adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Tebing Tinggi Barat	9.635	8.747	18.382	8,92%
2	Tebing Tinggi	34.525	32.694	67.219	32,61%
3	Tebing Tinggi Timur	6.897	6.396	13.293	6,45%
4	Rangsang	10.526	9.597	20.123	9,76%
5	Rangsang Pesisir	9.707	9.146	18.853	9,15%
6	Rangsang Barat	10.008	9.480	19.488	9,45%
7	Merbau	7.914	7.391	15.305	7,43%
8	Pulau Merbau	8.187	7.637	15.824	7,68%
9	Tasik Putri Puyu	9.103	8.526	17.629	8,55%
∑	<b>Jumlah Total</b>	<b>106.502</b>	<b>99.614</b>	<b>206.116</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kabupaten Kepulauan Meranti dalam angka 2021

### 4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti

#### 1) Visi

Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti maju, dan bermartabat di Provinsi Riau Indonesia

#### 2) Misi

- 1) Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur
- 2) Meningkatkan dan pemerataan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia beriman dan bertaqwa yang memiliki daya saing
- 3) Meningkatkan mutu dan layanan kesehatan masyarakat
- 4) Menciptakan produktifitas perekonomian masyarakat
- 5) Membangun harmonisasi sosial budaya masyarakat
- 6) Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta memberikan layanan prima

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kepulauan meranti. Kabupaten kepulauan meranti memiliki 9 kecamatan dan 96 desa, 32 diantaranya digunakan sebagai sampel. Data diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa (kaur keuangan) serta kasi pemerintahan desa. Waktu penyebaran dan pengumpulan data kuesioner berlangsung selama lebih kurang satu bulan yaitu dilakukan dari tanggal 04 Maret

2022 – 04 April 2022. Dari 32 desa yang dijadikan sebagai sampel, peneliti menyebarkan 128 kuesioner di beberapa desa dan jumlah kembalinya responden pada kuesioner yang disebar adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Kembalinya Data Kuesioner**

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase (%)
1	Kuesioner yang disebar	128	100%
2	Kuesioner yang kembali	119	93%
3	Kuesioner yang tidak kembali	9	7%
4	Kuesioner yang dapat diolah	119	93%

*Sumber: Data kuesioner yang diolah, 2022*

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 128 total keseluruhan kuesioner yang telah disebar, ada sebanyak 119 kuesioner yang kembali dengan tingkat persentase sebesar 93%. Dari kuesioner yang dikembalikan, terdapat 9 kuesioner yang tidak dikembalikan dengan tingkat persentase sebesar 7%, sehingga keseluruhan kuesioner yang kembali dan yang dapat diproses sebanyak 119 kuesioner dengan besarnya tingkat persentase 93%.

#### **4.2.2 Karakteristik Responden**

Karakteristik responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan dan lama masa kerja pada Desa Se-Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Rangsang Barat dan Pulau Merbau di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikut ini diuraikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan dan lama masa kerja.

#### 4.2.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, tabel di bawah menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini kebanyakan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 92 responden dengan tingkat persentase sebesar 77% sedangkan berjenis kelamin perempuan sebanyak 27 responden dengan tingkat persentase sebesar 23%.

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	92	77%
2	Perempuan	27	23%
<b>Jumlah</b>		<b>119</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data kuesioner yang diolah, 2022

#### 4.2.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Berdasarkan umur responden, tabel dibawah ini menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini berumur antara 31-40 tahun yaitu sebanyak 40 responden dengan tingkat persentase sebesar 33%, diikuti dengan umur antara 21-30 tahun sebanyak 33 responden dengan tingkat persentase sebesar 28%, kemudian berumur 41-50 tahun sebanyak 28 responden dengan tingkat persentase sebesar 23%, serta selanjutnya berumur > 50 tahun sebanyak 19 responden dengan tingkat persentase sebesar 16%.

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Umur**

No	Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1	21-30	33	28%
2	31-40	40	33%
3	41-50	27	23%
4	> 50	19	16%
<b>Jumlah</b>		<b>119%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data kuesioner yang diolah, 2022

#### 4.2.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikan responden, tabel dibawah menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini rata-rata menyelesaikan jenjang pendidikan SMA yaitu sebanyak 70 responden dengan tingkat persentase sebesar 59%, jenjang pendidikan S1 sebanyak 35 responden dengan tingkat persentase sebesar 29%, selanjutnya jenjang pendidikan D3 sebanyak 13 responden dengan tingkat persentase sebesar 11%, dan terakhir jenjang pendidikan SMP sebanyak 1 responden dengan tingkat persentase sebesar 1%.

**Tabel 4.5**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMP	1	1%
2	SMA	70	59%
3	D3	13	11%
4	S1	35	29%
<b>Jumlah</b>		<b>119%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data kuesioner yang diolah, 2022

#### 4.2.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Masa Kerja

Berdasarkan lama masa kerja, tabel dibawah ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki masa kerja rata-rata selama 1-5 tahun sebanyak 59 responden dengan tingkat persentase sebesar 49%, masa kerja selama 6-10 tahun sebanyak 39 responden dengan tingkat persentase sebesar 33%, dan masa kerja selama > 10 tahun sebanyak 21 responden dengan tingkat persentase sebesar 18%.

**Tabel 4.6**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Masa Kerja**

No	Lama Masa Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
1	1-5	59	49%
2	6-10	39	33%
3	> 10	21	18%
<b>Jumlah</b>		<b>119%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data kuesioner yang diolah, 2022

#### 4.2.3 Statistik Deskriptif

Statistik berfungsi memberikan gambaran atau deskriptif mengenai suatu data dalam penelitian, yang dilihat dari *mean* dan standar deviasi. Pengukuran nilai *mean* adalah pengukuran yang biasa digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data. Nilai terendah merupakan nilai terkecil dari distribusi suatu data sedangkan nilai tertinggi merupakan nilai terbesar dari distribusi suatu data. Penelitian ini menggunakan IBM SPSS 25 dalam analisis statistik deskriptif dengan hasil analisis adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Sumber Daya Manusia	119	20.00	30.00	25.8655	1.94381
Partisipasi Penganggaran	119	15.00	30.00	24.1429	3.00927
Pemanfaatan Teknologi Informasi	119	21.00	30.00	25.8908	2.47629
Akuntabilitas	119	22.00	30.00	26.3361	2.11242
Valid N (listwise)	119				

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa statistik deskriptif dari variabel yang diteliti yaitu:

1. Variabel kompetensi sumber daya manusia jumlah sampel yaitu sebanyak 119, dengan nilai minimum 20,00, nilai maximum 30,00, nilai mean sebesar 25,8655 satuan dan standar deviasi sebesar 1,94381. Ini berarti bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi lebih rendah dari nilai rata-ratanya (mean). Yang artinya data telah berdistribusi dengan merata.
2. Variabel partisipasi penganggaran jumlah sampel yaitu sebanyak 119, dengan nilai minimum 15,00, nilai maximum 30,00, nilai mean sebesar 24,1429 satuan dan standar deviasi sebesar 3,00927. Ini berarti bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi lebih rendah dari nilai rata-ratanya (mean). Yang artinya data telah berdistribusi dengan merata.
3. Variabel pemanfaatan teknologi informasi jumlah sampel yaitu sebanyak 119, dengan nilai minimum 21,00, nilai maximum 30,00, nilai mean sebesar 25,8908 satuan dan standar deviasi sebesar 2,47629. Ini berarti bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi lebih rendah dari nilai rata-ratanya (mean). Yang artinya data telah berdistribusi dengan merata.
4. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa jumlah sampel yaitu sebanyak 119, dengan nilai minimum 22,00, nilai maximum 30,00, nilai mean sebesar 26,3361 satuan dan standar deviasi sebesar 2,11242. Ini berarti bahwa nilai

mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi lebih rendah dari nilai rata-ratanya (mean). Yang artinya data telah berdistribusi dengan merata.

#### 4.2.4 Uji Kualitas Data

##### 4.2.4.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk proses yang digunakan untuk mengukur sah atau valid suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan antara nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel dengan tingkat signifikansi 0,05. Jumlah responden ( $n$ ) = 119, nilai  $r$  tabel yang didapat sebesar 0,179. Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel maka kuesioner dapat dikatakan valid. Sedangkan, jika  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  tabel maka kuesioner dapat dikatakan tidak valid. Berikut hasil uji validitas dengan bantuan program SPSS 25:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia**

No	Butir-Butir Pertanyaan	Uji Validitas		Keterangan
		r tabel	r hitung	
1	KSDM.1	0,179	0,590	Valid
2	KSDM.2	0,179	0,771	Valid
3	KSDM.3	0,179	0,447	Valid
4	KSDM.4	0,179	0,618	Valid
5	KSDM.5	0,179	0,686	Valid
6	KSDM.6	0,179	0,660	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil uji validitas untuk variabel kompetensi sumber daya manusia pada setiap butir-butir pertanyaan

dikatakan valid, dibuktikan dengan nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Sehingga data dari variabel kompetensi sumber daya manusia dapat diperoleh kesimpulan bahwa kuesioner data valid.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Penganggaran**

No	Butir-Butir Pertanyaan	Uji Validitas		Keterangan
		r tabel	r hitung	
1	PP.1	0,179	0,766	Valid
2	PP.2	0,179	0,754	Valid
3	PP.3	0,179	0,665	Valid
4	PP.4	0,179	0,793	Valid
5	PP.5	0,179	0,706	Valid
6	PP.6	0,179	0,600	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil uji validitas untuk variabel partisipasi penganggaran pada setiap butir-butir pertanyaan dikatakan valid, dibuktikan dengan nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Sehingga data dari variabel partisipasi penganggaran dapat diperoleh kesimpulan bahwa kuesioner data valid.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi**

No	Butir-Butir Pertanyaan	Uji Validitas		Keterangan
		r tabel	r hitung	
1	PTI.1	0,179	0,663	Valid
2	PTI.2	0,179	0,794	Valid
3	PTI.3	0,179	0,692	Valid
4	PTI.4	0,179	0,648	Valid
5	PTI.5	0,179	0,729	Valid
6	PTI.6	0,179	0,710	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil uji validitas untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi pada setiap butir-butir pertanyaan

dikatakan valid, dibuktikan dengan nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Sehingga data dari variabel pemanfaatan teknologi informasi dapat diperoleh kesimpulan bahwa kuesioner data valid.

**Table 4.11**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

No	Butir-Butir Pertanyaan	Uji Validitas		Keterangan
		r tabel	r hitung	
1	A.1	0,179	0,646	Valid
2	A.2	0,179	0,741	Valid
3	A.3	0,179	0,844	Valid
4	A.4	0,179	0,758	Valid
5	A.5	0,179	0,629	Valid
6	A.6	0,179	0,433	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa hasil uji validitas untuk variabel akuntabilitas pada setiap butir-butir pertanyaan dikatakan valid, dibuktikan dengan nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Sehingga data dari variabel akuntabilitas dapat diperoleh kesimpulan bahwa kuesioner data valid.

#### 4.2.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengungkapan tetap atau konsisten terhadap butir pertanyaan yang sudah dilakukan uji validitas atau yang sudah dikatakan valid. Uji reliabilitas ditentukan dengan kriteria jika *Cronbach Alpha*  $>$  0,70 maka pertanyaan dapat diterima atau dikatakan reliabel. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur variabel dari masing-masing pertanyaan yaitu variabel kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran, pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berikut hasil uji reliabilitas dengan bantuan program SPSS 25:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Reliabilitas Kompetensi Sumber Daya Manusia**

<b>Reliability Statistics</b>		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.710	.704	6

*Sumber: Data Olahan SPSS 25*

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Reliabilitas Partisipasi Penganggaran**

<b>Reliability Statistics</b>		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.806	.808	6

*Sumber: Data Olahan SPSS 25*

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Reliabilitas Pemanfaatan Teknologi Informasi**

<b>Reliability Statistics</b>		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.783	.802	6

*Sumber: Data Olahan SPSS 25*

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

<b>Reliability Statistics</b>		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.744	.762	6

*Sumber: Data Olahan SPSS 25*

Berdasarkan tabel dari hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan hasil bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dengan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,710, variabel partisipasi penganggaran dengan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,806, variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,783, dan untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,744. Hasil *Cronbach Alpha* > 0,70 dari setiap variabel tersebut. Sehingga hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian dapat diterima atau dikatakan reliabel.

#### 4.2.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Berikut hasil uji asumsi klasik dari ke tiga pengujian tersebut:

##### 4.2.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui dan menguji suatu variabel pengganggu atau nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov Test* dengan kriteria pengambilan keputusan nilai Signifikansi > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal, sebaliknya nilai Signifikansi < 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test*:

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Kolmogorov Smirnov**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		119
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.38911812
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.114
	Negative	-.084
Test Statistic		.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 <sup>c</sup>
Exact Sig. (2-tailed)		.084
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.16 mengenai hasil dari uji asumsi klasik pada uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov Test* dengan kriteria pengambilan keputusan menggunakan nilai signifikansi yang menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,084 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Sehingga hasil uji *Kolmogorov Smirnov Test* dapat disimpulkan bahwa data dinyatakan berdistribusi normal.

#### 4.2.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi menentukan korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas dalam model regresi dilakukan dan dilihat dengan nilai *Tolerance* serta *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi yang baik tidak memiliki atau tidak ada gejala multikolinearitas dengan nilai *Tolerance*  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$  maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berikut hasil uji asumsi klasik berdasarkan uji multikolinearitas dengan bantuan program SPSS 25:

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1 (Constant)	.091		
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	.000	.699	1.431
Partisipasi Penganggaran (X2)	.005	.814	1.229
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	.000	.839	1.192

Sumber: Data Olahan SPSS 25

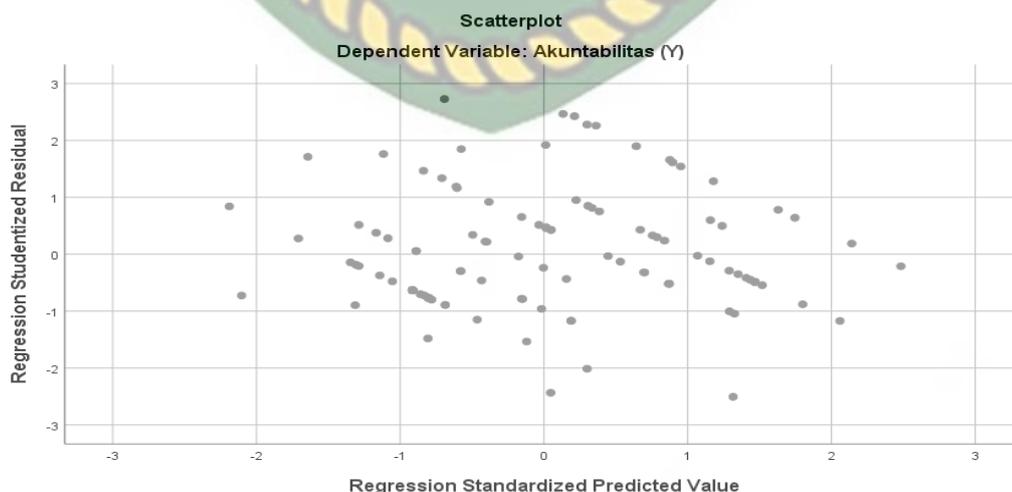
Berdasarkan Tabel 4.17 mengenai hasil uji asumsi klasik pada uji multikolinearitas yang dilakukan dan menunjukkan hasil bahwa nilai *Tolerance* pada variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,699, pada variabel partisipasi penganggaran sebesar 0,814 dan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,839. Hasil nilai *Tolerance*  $> 0,10$  dari masing-masing variabel bebas (independen). Selanjutnya, untuk nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 1,431, variabel partisipasi penganggaran sebesar 1,229, dan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar

1,192. Hasil nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $< 10$  yang artinya masing-masing variabel telah memenuhi syarat. Berdasarkan hasil nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen dalam penelitian tidak ada atau tidak terjadi gejala multikolinearitas.

#### 4.2.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji perbedaan varian dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam satu model regresi. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya ada, disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola tertentu pada grafik *scatterplot* serta dapat dilihat dari titik-titik yang menyebar berbentuk acak, tidak terlihat seperti pola sebagaimana bergelombang, melebar, dan menyempit. Kemudian titik-titik berada di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Berikut hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan grafik *scatterplot*:

**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Scatterplot**



Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan Gambar 4.1 mengenai hasil uji asumsi klasik pada uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan hasil grafik *scatterplot* yang menyatakan bahwa pola titik-titik terlihat berbentuk menyebar secara acak, titik-titik tersebut juga berada diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatterplot* dapat disimpulkan bahwa data dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selain menggunakan grafik *scatterplot* ada alternatif lain yang digunakan yaitu dengan menggunakan uji glejser yang bertujuan untuk menguji keakuratan atau ada keraguan dalam hasil grafik *scatterplot*. Berikut hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser:

**Table 4.18**  
**Hasil Uji Glejser**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.829	1.130		.734	.465
	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	.061	.047	.141	1.296	.198
	Partisipasi Penganggaran (X2)	.016	.028	.057	.562	.575
	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	-.065	.034	-.193	-1.935	.055

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.18 diatas mengenai uji asumsi klasik pada uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan hasil uji glejser yang menyatakan bahwa nilai signifikansi pada masing-masing variabel yaitu, variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,198, variabel partisipasi penganggaran sebesar 0,575, dan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,055. Hasil

nilai antara variabel independen dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang artinya masing-masing variabel independen telah memenuhi syarat. Sehingga hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan hasil uji glejser dapat disimpulkan bahwa data dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### 4.2.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengungkapkan pengaruh antara variabel independen yaitu variabel kompetensi sumber daya manusia, variabel partisipasi penganggaran, variabel pemanfaatan teknologi informasi dan variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam melakukan model regresi linier berganda dari uji asumsi klasik yang sudah dilakukan seperti data normal, tidak terjadi gejala multikolinearitas dan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas merupakan model regresi yang baik dan yang memenuhi kriteria. Sehingga dari analisis sebelumnya dari uji asumsi klasik dapat dilihat bahwa model regresi linier berganda dapat dikatakan baik dan memenuhi kriteria. Berikut hasil analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 25:

**Tabel 4.19**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.251	1.907		1.705	.091
	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	.403	.080	.371	5.052	.000
	Partisipasi Penganggaran (X2)	.136	.048	.194	2.854	.005
	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	.362	.057	.425	6.345	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.19 mengenai hasil analisis regresi linier berganda yang menyatakan bahwa hasil nilai konstanta sebesar 3,251, hasil nilai koefisien pada variabel independen yaitu variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,403, variabel partisipasi penganggaran sebesar 0,136, dan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,362. Sehingga model regresi akhir yang didapat adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 3,251 + 0,403 X_1 + 0,136 X_2 + 0,362 X_3 + e$$

Dimana :

$X_1$  = Kompetensi Sumber Daya Manusia

$X_2$  = Partisipasi Penganggaran

$X_3$  = Pemanfaatan Teknologi Informasi

$\alpha = 3,251$  merupakan konstanta

Dari persamaan regresi linier berganda diatas dapat dijelaskan atau diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah sebesar 3,251 menjelaskan bahwa pada variabel independen yaitu variabel kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pemanfaatan teknologi informasi menyatakan bahwa apabila pada variabel tersebut dianggap konstan maka dalam persamaan tersebut nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu sebesar 3,251 satuan.
2. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda dilihat nilai koefisien regresi bernilai positif pada variabel kompetensi sumber daya manusia dengan nilai sebesar 0,403 satuan. Nilai koefisien regresi menunjukkan

bahwa setiap peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,403 dengan variabel independen yang diasumsikan dianggap konstan.

3. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda dilihat nilai koefisien regresi bernilai positif pada variabel partisipasi penganggaran dengan nilai sebesar 0,136 satuan. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan partisipasi penganggaran pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,136 dengan variabel independen yang diasumsikan dianggap konstan.
4. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda dilihat nilai koefisien regresi bernilai positif pada variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai sebesar 0,362 satuan. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,362 dengan variabel independen diasumsikan dianggap konstan.

#### **4.2.7 Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji kelayakan model (Uji F) dan uji signifikansi secara parsial (Uji t). Berikut hasil pengujian hipotesis dari ke tiga pengujian tersebut dengan menggunakan bantuan program SPSS 25:

#### 4.2.7.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui mengenai seberapa jauh kemampuan model yang diukur dalam variasi variabel terikat (dependen). Besarnya kemampuan dari variabel kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Berikut hasil uji koefisien determinasi  $R^2$  dengan bantuan program SPSS 25:

**Tabel 4.20**  
**Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.753 <sup>a</sup>	.568	.556	1.40712

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3), Partisipasi Penganggaran (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.20 diatas mengenai uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang menyatakan bahwa nilai *Adjusted R Square* yang didapatkan sebesar 0,556 atau 55,6%. Hal ini mengartikan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 55,6%, sedangkan besaran dari sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 44,4% dan tidak dijelaskan dalam penelitian.

#### 4.2.7.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji kelayakan model digunakan untuk mengetahui mengenai apakah dari variabel independen yang digunakan yaitu kompetensi sumber daya manusia,

partisipasi penganggaran dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh secara simultan atau tidak terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berikut hasil uji kelayakan model dengan menggunakan bantuan program SPSS 25:

**Tabel 4.21**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	298.856	3	99.619	50.313	.000 <sup>b</sup>
	Residual	227.699	115	1.980		
	Total	526.555	118			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

b. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3), Partisipasi Penganggaran (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.21 diatas mengenai uji kelayakan model (uji F) yang menyatakan bahwa nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai f hitung  $50,313 > f$  tabel 2,68, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### 4.2.7.3 Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t)

Uji signifikansi secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh uji t secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Diketahui tingkat signifikansi pada t tabel yaitu  $5\% = 0.05$  dengan jumlah sampel  $(n) = 119$  dan jumlah variabel independen  $(k) = 3$ . Sehingga didapatkan t tabel yaitu 1,980.

## 1. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Untuk menguji hipotesis maka dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho : Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti

Ha : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti

Hasil analisis data variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung  $5,052 >$  nilai  $t$  tabel  $1,980$  dan nilai signifikansi  $0,000 <$   $0,05$ . Nilai  $t$  hitung yang bertanda positif dan lebih besar dari pada  $t$  tabel serta nilai signifikansi lebih kecil dari  $0,05$  yang artinya bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai pengaruh dan hubungan yang searah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jadi dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 2. Variabel Partisipasi Penganggaran

Untuk menguji hipotesis maka dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho : Partisipasi Penganggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti

Ha : Partisipasi Penganggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti

Hasil analisis data variabel Partisipasi Penganggaran menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung  $2,854 >$  nilai  $t$  tabel  $1,980$  dan nilai signifikansi  $0,005 <$   $0,05$ . Nilai  $t$

hitung yang bertanda positif dan lebih besar dari t tabel serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 berarti bahwa variabel Partisipasi Penganggaran mempunyai pengaruh dan hubungan yang searah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jadi dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa Partisipasi Penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

### 3. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk menguji hipotesis maka dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0$  : Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti

$H_a$  : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti

Hasil analisis data variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi menunjukkan bahwa t hitung  $6,345 >$  nilai t tabel  $1,980$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Nilai t hitung yang bertanda positif dan lebih besar dari t tabel serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 berarti bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai pengaruh dan hubungan yang searah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jadi dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

### 4.3 Pembahasan

#### 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama yang dilakukan dalam pengujian signifikansi secara parsial yang menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hal tersebut mendukung *agency theory* yang menyatakan bahwa setiap masalah keagenan dalam teori agensi terjadi karena adanya perbedaan kepentingan pemerintah desa dan masyarakat, yang menyebabkan pemerintah desa selalu bertindak tidak sesuai keinginan masyarakat. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas dengan meningkatnya kompetensi sumber daya manusia terkait pengelolaan dana desa, maka penerapan mekanisme control dalam membantu prinsipal dan tuntutan akuntabilitas dapat tercapai.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang dimiliki seseorang dalam mengelola dana desa yang baik. Berkualitasnya kompetensi sumber daya manusia ditujukan melalui pengetahuan, keahlian dan sikap. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia adalah suatu faktor penting dalam pengelolaan dana desa yang cukup besar. Jika kompetensi sumber daya

manusia dalam pemerintah desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti dikelola memiliki pengetahuan, keahlian dan sikap, maka proses dalam pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana desa akan tercapai.

Penelitian ini hasilnya sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Umaira & Adnan, 2019) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil yang serupa pada penelitian (Pahlawan et al., 2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga dapat membuktikan bahwa semakin besar kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Perdana, 2018) dan (Riyadi & Kurnandi, 2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **2. Partisipasi Penganggaran Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua yang dilakukan dalam pengujian signifikansi secara parsial yang menyatakan bahwa variabel partisipasi penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat dan semakin besar partisipasi penganggaran dalam pengelolaan desa maka akan semakin tinggi masyarakat yang terlibat

dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hal tersebut mendukung *agency theory* yang menyatakan bahwa setiap masalah keagenan dalam teori agensi terjadi karena adanya perbedaan kepentingan pemerintah desa dan masyarakat, yang menyebabkan pemerintah desa selalu bertindak tidak sesuai keinginan masyarakat. Dalam hal ini partisipasi penganggaran berperan penting dalam memantau pemerintah desa atas aktivitas terkait pengelolaan dana desa. Partisipasi penganggaran melakukan pemantauan langsung dari tahap perencanaan hingga pengelolaan serta menerima pertanggungjawaban dari pemerintah desa.

Partisipasi penganggaran yaitu prinsip dalam setiap pengambilan keputusan yang diselenggarakan pemerintah desa dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat. Partisipasi penganggaran yang baik menyebabkan akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin baik. Informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai penggunaan dan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa merupakan suatu keterbukaan bagi pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Keterlibatan masyarakat dapat memudahkan pemerintah desa dalam proses pembangunan desa serta menciptakan rasa tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat mengurangi penyimpangan pada pemerintah desa yang tidak bertanggungjawab.

Penelitian ini hasilnya sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nurkhasanah, 2019) yang menyatakan bahwa partisipasi penganggaran

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil yang serupa pada penelitian (Arum Cahyati, 2021) dan penelitian (Negara, 2021) yang menyatakan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga dapat membuktikan bahwa semakin besar partisipasi penganggaran maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Indraswari & Rahayu, 2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga yang dilakukan dalam pengujian signifikansi secara parsial yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan desa maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hal tersebut mendukung *agency theory* yang menyatakan bahwa setiap masalah keagenan dalam teori agensi terjadi karena adanya perbedaan kepentingan pemerintah desa dan masyarakat, yang menyebabkan pemerintah desa selalu bertindak tidak sesuai keinginan masyarakat. Dalam hal ini pemanfaatan teknologi informasi dijadikan sebagai hal penting dalam mendapatkan informasi yang akurat terkait pengelolaan dana desa. Selain itu

dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat memudahkan masyarakat mengakses layanan publik dengan lebih mudah.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor penting yang sangat diperlukan bagi pemerintah desa karena membantu dan memudahkan dalam mengelola desa serta mempertanggungjawabkan seluruh informasi keuangan desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penggunaan teknologi informasi yang digunakan seperti perangkat komputer dalam mengolah dan melaporkan seluruh pertanggungjawaban dalam laporan keuangan akan memberikan ketepatan dan keakuratan suatu data sehingga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan yang terjadi. Laporan keuangan dana desa yang dikelola akan memiliki efisiensi waktu dan akan transparan jika memanfaatkan teknologi informasi dengan baik.

Penelitian ini hasilnya sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nurjaya et al., 2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil yang serupa pada penelitian (Indraswari & Rahayu, 2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga dapat membuktikan bahwa semakin besar pemanfaatan teknologi informasi maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Negara, 2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **4. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Berdasarkan pengujian hipotesis keempat yang dilakukan dalam pengujian simultan yang hasilnya menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Besarnya pengaruh dari variabel kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu sebesar 0,556 atau 55,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari penelitian yang tidak diteliti.

Penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Semakin besar Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi maka akan semakin baik Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil uji determinasi *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi memberikan pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, meskipun dalam pengujian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan dari faktor-faktor lain dari model penelitian ini yang dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini, jadi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Partisipasi Penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka selanjutnya peneliti memberikan saran untuk pengembangan penelitian yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah Desa

Pada penelitian ini hasilnya diharapkan agar pemerintah desa lebih meninjau kemampuan dan keahlian aparatur dalam pengelolaan dana desa yang tersebar dalam setiap desa di kabupaten kepulauan meranti secara merata, dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi kebijakan dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya, pemerintah desa lebih harus transparan dalam pengelolaan dana desa agar pembangunan desa terealisasi dengan lebih baik.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas penelitian dengan lokasi yang berbeda dan adanya tambahan variabel lain yang mungkin mempengaruhi banyak hal dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang belum dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian selanjutnya juga bisa mengambil sampel lebih banyak, hal ini bertujuan agar mendapatkan data yang lebih akurat dan tentunya penelitian ini akan jauh lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arum Cahyati, N. (2021). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Se-Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)*. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, 10(1).
- Aulia, P. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota*. *Jurnal Online Mahasiswa Feb*, 1(1), 1–15.
- Banga, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. In Ghalia Indonesia, Bogor.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. In Jakarta: Erlangga.
- DJPK Kemenkeu. (2020). *Dana Desa 2020* (p. 13). [djpgk.kemenkeu.go.id](http://djpgk.kemenkeu.go.id). [www.djpgk.kemenkeu.go.id](http://www.djpgk.kemenkeu.go.id):<https://djpgk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2019/09/7.-DANA-DESA.pdf>
- E Sulaiman. (2021). *Realisasi Penyaluran Dana Desa di Meranti Tercepat dan Terbesar di Riau*. [Iaupos.Jawapos.Com](http://Iaupos.Jawapos.Com). <https://riaupos.jawapos.com/kepulauan-meranti/04/10/2021/259064/realisasi-penyaluran-dana-desa-di-meranti-tercepat-dan-terbesar-di-riau.html>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan. (2021). *Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Meranti Ditangkap Polisi*. [Goriau.Com](http://Goriau.Com). <https://www.goriau.com/berita/baca/video-korupsi-dana-desa-mantan-kades-di-meranti-ditangkap-polisi-begini-modusnya.html>
- Homayoun, S., & Homayoun, S. (2015). *Theory Agency*.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). *Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15.
- JDIH BPK. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. In *Peraturan.Bpk.Go.Id* (Vol. 51, Issue 1, p. 51).

- Kadir, A. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi* (Andi (ed.)). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). *Penyaluran Dana Desa Juga Dipercepat dan Disederhanakan Untuk Ketahanan Ekonomi*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penyaluran-dana-desa-juga-dipercepat-dan-disederhanakan-untuk-ketahanan-ekonomi/>
- Kharis, A. (2019). *Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pada PT Avia Avian*. *Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran,"* 2, 113–150.
- Komarasari, W. (2016). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan)*. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi,* 2(2), 65–66.
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. In Mardiasmo (Ed.), Yogyakarta: Andi.
- Meckling, & Jensen, M. (1976). *Theory Of Firm : Manajerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure*. *Journal of Financial Economic,* 13(2).
- Negara, D. S. (2021). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Empiris di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo)*. *Bisnis & Ekonomika.*
- Nurjaya, N., Affandi, A., Ilham, D., Jasmani, J., & Sunarsi, D. (2021). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kepala Desa Di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta*. *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia),* 4(3), 332.
- Nurkhasanah. (2019a). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)*. *Skripsi, UIN Walisongo Semarang,* 53(9), 1689–1699.
- Nurkhasanah, I. (2019b). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat)*. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah. Magelang,* 53(9), 1689–1699.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan*

- Dana Desa*. Indonesia Accounting Journal, 2(2), 162.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). *Agency Theory: Review Of Theory And Evidence On Problems And Perspectives*. Indian Journal of Corporate Governance, 10(1), 74–95.
- Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 5. (2017). *Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Aalokasi Dana Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60. (2014). *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Perdana, K. W. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul*. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta, 55.
- Rini Imron. (2021). *Diduga Korupsi Dana Desa Serta BumDes Selama 3 Tahun*. Amanahnews.Com. <https://amanahnews.com/read/detail/66428/>
- Rismawati, T. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamat*. Universitas Muhammadiyah Magelang, 4(2), 66.
- Riyadi, W., & Kurnadi, E. (2020). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Influence of Information Technology Utilization , Budgeting Participation and Supervi*. Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 3(2), 160–168.
- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). *Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi, 14(1 Maret), 100–114.
- Sarah, J. Y. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Aloksi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tanjung Lubuk*. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). *Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Proceedings Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice, 3, 580–590.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa/Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Supadmi & Dharma. (2018). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar*. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 13(2), 132–145.

Umaira, S., & Adnan, A. (2019). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6. (2014). *Tentang Desa*.

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2).

Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. In Jakarta: Salemba Empat.

